

Vox Populi
Volume 9, Nomor 1, Juni 2026 (83-98)
https://doi.org/10.24252/vp.v9i1.68696

Dinamika Peran Aktor dalam Kerjasama Internasional Program RISE di Kota Makassar 2021–2024

Nur Aliyah Zainal[1*], Armin Arsyad[2], Adi Suryadi B[3]
[1]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
[2,3]Universitas Hasanuddin
**Corresponding Author:* nur.aliyah@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dinamika peran aktor dalam Program Revitalising Informal Settlements and Their Environments (RISE) di Kota Makassar periode 2021–2024. Program RISE merupakan kerja sama internasional yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman informal melalui pendekatan Water Sensitive City (WSC). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Monash University berperan sebagai inisiator dan pengembang konsep program, Asian Development Bank (ADB) sebagai fasilitator pendanaan dan implementasi, Universitas Hasanuddin sebagai mitra akademik lokal, serta Pemerintah Kota Makassar sebagai fasilitator kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Meskipun terdapat perbedaan kepentingan antaraktor, konflik dapat dikelola melalui koordinasi, pembagian peran, dan mekanisme konsensus. Temuan ini menunjukkan bahwa kolaborasi multiaktor menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan permukiman informal yang berkelanjutan.
Kata Kunci: Kerja Sama Internasional, Peran Aktor, RISE, Permukiman Informal, Water Sensitive Cities

Pendahuluan

Persoalan pemukiman kumuh atau *informan settlements* merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi kota-kota berkembang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai tekanan struktural seperti urbanisasi yang tak terkendali, ketimpangan ekonomi, keterbatasan akses terhadap lahan, serta lemahnya kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut data UN-Habitat, pada tahun 2018 sekitar 30,6% populasi perkotaan Indonesia tinggal di Kawasan kumuh. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan pemukiman informal bukan sekedar masalah fisik lingkungan, melainkan juga cerminan dari ketidakmerataan hasil Pembangunan yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi negara-negara berkembang (Perkim.id, 2025).

Article history: Received 3/6/2026; Revised 25/6/2026; Accepted 26/6/2026; Published 27/6/2026

© The Author(s), 2026.

Kota Makassar sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Kawasan Indonesia Timur tidak luput dari persoalan ini. Berdasarkan Keputusan Walikota Makassar No. 050.05/1341/Kep/05/2014, tercatat 103 dari 143 kelurahan di Kota Makassar masuk dalam kategori Kawasan kumuh. Sebanyak 432.115 jiwa atau sekitar 131.299 kepala keluarga bermukim di Kawasan tersebut dalam kondisi yang tidak layak huni, tanpa akses memadai terhadap air bersih, sanitasi dan infrastruktur lainnya. Kondisi ini diperparah olej laju pertumbuhan penduduk Kota Makassar yang mencapai 1,5% per tahun, melampaui rata-rata pertumbuhan penduduk perkotaan nasional. Tekanan demografis yang terus meningkat ini pada gilirannya memperburuk kualitas lingkungan pemukiman dan memperlebar kesenjangan sosial ekonomi di tengah masyarakat kota (Mappe et al., 2024).

Sejumlah studi tentang lingkungan dan permukiman kumuh di Global South menunjukkan bahwa fenomena ini merupakan hasil interaksi kompleks antara urbanisasi, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi. Urbanisasi yang pesat mendorong migrasi ke kota tanpa diimbangi ketersediaan hunian layak, sehingga memicu munculnya permukiman informal (Zou et al., 2025; Suhartini & Jones, 2023). Ketimpangan pendapatan serta lemahnya investasi infrastruktur memperburuk kondisi tersebut, terutama di negara berkembang dengan sistem keuangan yang belum inklusif (Arimah, 2011; Suhartini & Jones, 2023). Selain itu, lemahnya tata kelola memperparah kerentanan masyarakat kumuh, khususnya terkait ketiadaan hak atas tanah yang meningkatkan risiko penggusuran dan marginalisasi sosial (Chirisa & Muneta, 2023; Roberts & Okanya, 2022).

Dari sisi kebijakan, berbagai intervensi pemerintah dan inisiatif global telah diupayakan untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk melalui program peningkatan kualitas kawasan kumuh dan agenda pembangunan berkelanjutan. Namun, banyak kebijakan masih berorientasi pada penggusuran daripada peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan, sehingga justru memicu relokasi paksa dan ketidakstabilan sosial (Nkrumah Agyabeng & Preko, 2021; Milbert, 2006; Croese et al., 2016). Efektivitas intervensi juga seringkali terbatas akibat kurangnya pelibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan implementasi, padahal pendekatan partisipatif terbukti mampu memperkuat identitas komunitas sekaligus meningkatkan keberhasilan program (Gandikota, 2024; Zou et al., 2025).

Dimensi sosial-budaya dan lingkungan turut membentuk dinamika permukiman kumuh. Stigmatisasi terhadap kawasan kumuh menyebabkan eksklusi sosial dan membatasi akses penghuni terhadap peluang ekonomi dan layanan dasar (Beier, 2020; Dupont et al., 2015). Di sisi lain, tantangan keberlanjutan lingkungan seperti sani-

tasi buruk dan degradasi lingkungan menuntut strategi pembangunan kota yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Kishan et al., 2022; Novanta & Soewondo, 2024). Menariknya, banyak komunitas kumuh mengembangkan mekanisme swadaya dan inisiatif berbasis komunitas yang adaptif terhadap kebutuhan lokal, yang dalam banyak kasus lebih efektif dibanding pendekatan top-down (Suhartini & Jones, 2023; Gandikota, 2024). Ini menunjukkan bahwa pendekatan holistik yang mengintegrasikan tata kelola yang efektif, partisipasi masyarakat, serta strategi pembangunan berkelanjutan dalam menangani permasalahan permukiman kumuh menjadi penting.

Di Indonesia, salah satu bentuk kerja sama internasional yang hadir di Kota Makassar adalah program Revitilising Informal Settlements and Their Environments (RISE). Program ini pertama kali diinisiasi pada tahun 2017 oleh Monash University dengan menjadikan Kecamatan Batua, Kelurahan Manggala, Kota Makassar sebagai lokasi percontohan (*demonstration site*) yang secara resmi dimulai pada November 2018. Program RISE menerapkan pendekatan *water sensitive city* (WSC) yang mengintegrasikan solusi berbasis alam untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di pemukiman informal perkotaan. Dengan dukungan pendanaan internasional sebesar AU$60 juta dari berbagai sumber termasuk Wellcome Trust, pemerintah Australia, Asian Development Bank (ADB), program ini dirancang untuk menjangkau 24 pemukiman informal di Makassar, Indonesia dan Suva, Fiji (RISE, 2018).

Program RISE ini berbeda dengan program Pembangunan pemukiman konvensional karena sifatnya kolabotatif dan multiaktor. Program ini tidak hanya melibatkan satu lembaga donor atau satu instansi pemetintah, melainkan merupakan hasil dari interaksi dan kesepakatan antara beberapa aktor dengan latar belakang, kepentingan dan kapasitas yang berbeda-beda. Di Kota Makassar, empat aktor utama terlibat yaitu Monash University sebagai inisiator program, Asian Development Bank sebagai Lembaga pembiayaan internasional, Universitas Hasanuddin (Unhas) sebagai mitra akademik local dan pemerintah Kota Makassar sebagai otoritas wilyah sekaligus fasilitator implementasi di lapangan. Setiap aktor membawa mandat kelembagaan, kepentingan strategis dan sumber daya yang berbeda ke dalam program ini, sehingga proses interaksi di antara mereka tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik yang menyertainya.

Penelitian tentang program RISE sebelumnya lebih banyak dilihat dari sisi kesehatan masyarakat, arsitektur, lingkungan hidup, dan pembangunan berkelanjutan. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus mempelajari program ini dari sudut pandang ilmu politik, terutama dalam hal peran aktor yang terlibat. Padahal, dalam kerjasama internasional yang melibatkan institusi dengan kepentingan berbeda, pasti ada proses negosiasi, tarik-menarik kepentingan, dan kompromi yang membentuk jalannya

program RISE. Kerjasama ini bukan hanya tentang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama, tetapi juga dapat menyembunyikan perebutan kekuasaan di antara para mitra yang terlibat dalam program RISE.

Memahami dinamika peran aktor dalam program RISE sangat penting karena dua alasan utama. Alasan pertama, dari sisi akademis, penelitian ini akan membantu mengisi kekurangan literatur tentang sisi politik dari program-program pembangunan internasional yang melibatkan banyak pihak, terutama yang beroperasi di level kota. Alasan kedua, dari sisi praktis, dengan memahami peran masing-masing aktor berkontribusi dan berinteraksi, kita dapat memperoleh pelajaran berharga untuk pengambil kebijakan dan pelaksana program serupa di masa depan, baik di Kota Makassar maupun di kota-kota lain di Indonesia.

Teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah Teori Peran Aktor, Kerja Sama Internasional, Konflik dan Konsensus. Teori peran aktor dalam ilmu politik, memiliki posisi, fungsi, dan kontribusi setiap pihak dalam sistem interaksi sangat penting. Dalam konteks kerjasama internasional, aktor yang terlibat tidak hanya negara, tetapi juga organisasi internasional, lembaga akademik, lembaga keuangan, sektor swasta, dan pemerintah daerah. Masing-masing aktor memiliki kepentingan, sumber daya, dan kapasitas yang berbeda dalam mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga hubungan yang terbentuk di antara mereka tidak selalu bersifat harmonis, tetapi juga dapat diwarnai oleh perbedaan kepentingan dan negosiasi.

Perspektif tersebut menjelaskan bagaimana berbagai aktor membangun hubungan yang saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Scott Barrett, kerja sama internasional terbentuk ketika para aktor menilai bahwa manfaat yang diperoleh melalui tindakan kolektif lebih besar dibandingkan jika mereka bertindak sendiri. Barrett menjelaskan bahwa kerja sama yang berkelanjutan didasarkan pada dua asumsi utama, yaitu *individual rationality* dan *collective rationality* (Barrett, 1999). Rasionalitas individu mengacu pada pertimbangan setiap aktor untuk terlibat dalam suatu kerja sama karena adanya keuntungan yang dapat diperoleh, sedangkan rasionalitas kolektif menekankan kemampuan para aktor untuk mengidentifikasi serta memaksimalkan kepentingan bersama melalui koordinasi, negosiasi, dan pembagian peran. Dengan demikian, keberhasilan program RISE dapat dipahami sebagai hasil interaksi berbagai aktor yang secara rasional bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, meskipun masing-masing tetap membawa kepentingan dan agenda yang berbeda. Kepentingan ini menjadi alasan utama mereka membuat keputusan dan mengambil tindakan. Seperti yang dikatakan oleh Hindess, kepentingan aktor muncul dari keputusan yang dianggap menguntungkan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, mencapai

kepentingan menjadi tujuan utama dalam interaksi antar aktor. Setiap aktor berusaha untuk mencapai tujuannya, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hubungan dan kerjasama antara mereka (Hindess, 1984).

Penelitian ini fokus pada analisis peran aktor dalam program RISE di Kota Makassar dari 2021 hingga 2024. Periode ini penting karena program RISE mulai dijalankan secara aktif setelah pandemi Covid-19, yang membawa tantangan baru dan membutuhkan kerja sama dari semua pihak yang terlibat. Program RISE menghadapi penyesuaian besar pasca-pandemi. Maka, penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus. Dengan metode ini, kita bisa memahami bagaimana aktor-aktor berperan, berinteraksi, dan mencapai kesepakatan dalam menjalankan program RISE. Penelitian ini juga menggunakan kerangka teori konflik, kerjasama, dan konsensus. Tujuannya adalah untuk menganalisis dinamika peran aktor dalam implementasi program RISE. Dengan cara ini, kita dapat memahami peran yang dijalankan oleh setiap aktor dan cara mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan program.

Metode

Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan studi kasus. Alasannya, masalah yang diteliti bersifat kompleks dan kontekstual, sehingga tidak bisa diukur dengan angka. Seperti yang dikatakan Creswell, studi kasus cocok untuk menggali suatu fenomena secara mendalam dalam situasi nyata menggunakan berbagai sumber data. Kasus yang diteliti adalah pelaksanaan program RISE di Kota Makassar pada 2021–2024. Unit analisisnya adalah interaksi dan peran empat aktor utama, yaitu Monash University, Universitas Hasanuddin, Asian Development Bank, dan Pemerintah Kota Makassar.

Penelitian ini, data dikumpulkan melalui dua cara utama. Pertama, kami melakukan wawancara mendalam dengan orang-orang yang sangat tahu tentang program RISE. Mereka dipilih karena keterlibatan langsung dan pengetahuan mendalam mereka tentang program tersebut. Orang-orang yang kami wawancarai termasuk perwakilan Monash University, Manajer Area RISE Kota Makassar, perwakilan Universitas Hasanuddin, perwakilan Asian Development Bank di Indonesia, perwakilan Pemerintah Kota Makassar, yaitu Walikota Makassar saat program itu berjalan. Selain memilih orang-orang tersebut, kami juga menggunakan teknik *snowball sampling* untuk menemukan orang-orang lain yang relevan berdasarkan rekomendasi dari orang-orang yang sudah kami wawancarai sebelumnya. Dengan cara ini, data yang kami dapatkan menjadi lebih dalam dan komprehensif tentang program RISE.

Kedua, Penulis juga melakukan studi literatur dengan mengumpulkan berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan program RISE. Dokumen-dokumen tersebut meliputi laporan tahunan RISE dari tahun 2017 sampai 2024. Ada juga keputusan Walikota Makassar tentang kawasan kumuh, serta publikasi ilmiah dan laporan evaluasi program. Dokumen-dokumen ini digunakan sebagai sumber triangulasi. Fungsinya untuk memverifikasi dan memperkaya data yang saya dapatkan dari wawancara.

Analisis data dalam kajian ini memanfaatkan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Model ini terdiri dari tiga langkah yang berlangsung simultan. Langkah pertama adalah pengurangan data. Di fase ini, kami melakukan seleksi, penyederhanaan, dan modifikasi terhadap data awal yang telah kami himpun dari lapangan. Informasi yang tidak relevan untuk analisis peran aktor akan kami buang dan simpan secara terpisah. Sementara itu, data yang memiliki relevansi akan dikodekan berdasarkan tema yang mendasar. Temanya meliputi peran lembaga, kepentingan aktor, dinamika interaksi, serta proses konsensus yang memungkinkan kami untuk mengelompokkan dan memahami data yang kami peroleh. Dengan demikian, analisis data dapat dilakukan dengan lebih terfokus dan efisien (Qomaruddin et al., 2024).

Tahap berikutnya adalah penyampaian informasi, di mana informasi yang telah diringkas diorganisir dalam bentuk narasi yang deskriptif, tabel, atau grafik yang mempermudah analisis dan interpretasi. Penyampaian informasi dilakukan dengan cara tematik, mengikuti jalur analisis dari masing-masing pelaku sampai interaksi antara seluruh pelaku. Tahap selanjutnya adalah pengambilan kesimpulan dan validasi, yang merupakan proses memberikan makna terhadap pola-pola yang timbul dari informasi dan pemeriksaan kembali sumber informasi untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Keabsahan informasi dijamin melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data dari wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan untuk memastikan konsistensi dan kedalaman hasil temuan (Qomaruddin et al., 2024).

Pembahasan

Program RISE di Kota Makassar

Urbanisasi merupakan suatu fenomena sosial dan ekonomi yang berdampak pada perubahan besar dalam penggunaan lahan, baik di negara-negara yang sedang berkembang maupun di negara-negara yang telah maju. Peristiwa ini mengalami lonjakan jumlah penduduk di area perkotaan, yang terjadi akibat migrasi dari desa menuju kota demi mencari kualitas hidup yang lebih baik. Proses urbanisasi berdampak langsung pada

tingkat kepadatan di perkotaan, yang bisa diukur melalui jumlah penduduk dan konsentrasi bangunan. Urbanisasi yang tidak terkelola dengan baik dapat menghasilkan permukiman, baik resmi maupun tidak resmi, sebagai konsekuensi dari peningkatan populasi di daerah perkotaan (Atika et al., 2023). Fenomena urbanisasi ini memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat pendatang yang rentan terhadap kemampuan mereka dalam mendapatkan pekerjaan di perkotaan. Keterbatasan lapangan kerja di perkotaan ditambah dengan kapabilitas pendidikan dan skill kaum pendatang yang rata-rata berasal dari daerah (desa) yang membawa mereka hidup di pemukiman yang kurang layak dan bahkan bukan hak miliknya sehingga tempat tinggal yang kumuh menjadi hal jamak terjadi di perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 1 Tahun 2011, permukiman kumuh merujuk pada kawasan yang tidak memenuhi syarat untuk dihuni akibat dari ketidakteraturan dalam struktur bangunan, intensitas bangunan yang terlalu padat, serta kualitas bangunan dan fasilitas yang tidak sesuai standar. Hal ini sejalan dengan penjelasan oleh UN Habitat, di mana permukiman kumuh ditandai dengan keberadaan tempat tinggal dan layanan dasar yang tidak cukup baik (Atika et al., 2023, hlm. 170). Permukiman yang tidak layak biasanya terletak di pusat kota. Di sinilah penduduk yang banyak tinggal, tetapi kondisi rumah mereka sangat buruk. Keadaan ini sering kali menunjukkan bahwa mereka hidup dalam kemiskinan. Orang-orang yang tinggal di permukiman seperti ini memiliki kemampuan dan akses yang terbatas untuk mendapatkan rumah yang baik. Hal ini karena penghasilan mereka yang rendah. Akibatnya, mereka sering membangun rumah sendiri tanpa mengikuti aturan resmi tentang kepemilikan tanah. Lokasi permukiman ini sering kali strategis, tetapi juga berisiko. Infrastruktur dasar minim, dan bahan bangunan yang digunakan juga sederhana. Banyak keluarga berpenghasilan rendah dan pendatang baru di kota yang memilih tinggal di permukiman informal seperti ini. Sayangnya, tempat tinggal informal ini sering kali menjadi awal munculnya kawasan kumuh di berbagai daerah perkotaan (Atika et al., 2023, hlm. 176). Persoalan pemukiman kumuh ini terjadi di Kota Makassar sejak lama, meskipun telah ada program pemerintah seperti KOTAKU namun masalah ini belum teratasi.

Pada tahun 2017, Monash University melalui riset multidispiliner yang dibiayai oleh Wellcome Trust dan bermitra dengan ADB, Unhas dan Pemerintah Kota Makassar melakukan perbaikan terhadap pemukiman kumuh masyarakat Kota Makassar pada 12 wilayah yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Makassar sebagai pemegang otoritas teritorial. Namun pada saat penelitian penulis selesai dilakukan, masih 6 wilayah yang telah dibangun infrastrukturnya, 6 wilayah lainnya masih menunggu akibat dana yang belum mencukupi untuk membangun daerah tersebut. Adapun wilayah kumuh yang

dibangun terdapat antara lain di Gampancayya, RT1/ RW5 Kel. Tallo, Kec. Tallo, Bonelengga, RT4/RW5 Kel. Bulurokeng, Kec. Biringkanaya, Lempangang, RT2/RW3 Kel. Bulurokeng, Kec. Biringkanaya, Untia, RT1&2/RW 3&4, Kel. Untia, Kec. Biringkanaya, Alla'-Alla', RT2/RW3, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kampung Nelayan Barombong, RT7/RW1, Kel. Barombong, Kec. Tamalate. Wilayah lain yang belum terbangun infrastruktur yaitu Kampung Baru dan Birta (Antang), Borong Raya Baru, Pampang, Kampung Cedde dan Tunas Jaya Pattene.

Program RISE adalah program penelitian yang berfokus pada perbaikan kondisi di permukiman informal kota. Program ini bekerja pada bidang kesehatan, lingkungan, air, dan sanitasi. RISE ingin membuktikan bahwa dengan pendekatan lokal yang memperhatikan masalah air, mampu membuat permukiman informal menjadi lebih sehat dan ramah lingkungan. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup warga secara berkelanjutan dengan biaya yang efektif. RISE dikembangkan oleh Monash University sebagai program riset multidisipliner yang menggabungkan bidang kesehatan masyarakat, teknik lingkungan, arsitektur, perencanaan kota, dan ekologi. Program ini memperoleh pendanaan utama dari Wellcome Trust serta dukungan dari ADB yang bermitra lokal dengan Universitas Hasanuddin dan Pemerintah Kota Makassar. Tujuannya adalah membuktikan bahwa pendekatan berbasis alam (*nature-based solutions*) dapat meningkatkan kesehatan dan kualitas lingkungan di kawasan permukiman informal secara lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan sanitasi konvensional. Makassar dipilih sebagai salah satu lokasi utama bersama Suva (Fiji) karena kota ini memiliki banyak kawasan permukiman informal yang rentan terhadap banjir, pencemaran air, dan dampak perubahan iklim. Selain itu, Pemerintah Kota Makassar menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendukung inovasi pembangunan perkotaan (French et al., 2021).

Pelaksanaan program RISE di Makassar dilakukan dengan cara bekerja sama. Program ini melibatkan berbagai pihak, seperti organisasi internasional, universitas, pemerintah daerah (pemda), masyarakat, dan organisasi teknis. Tujuannya jelas: meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan di permukiman informal. Dengan pendekatan WSC yang menggabungkan pengelolaan air, sanitasi, kesehatan, dan lingkungan. Jadi, program ini tidak hanya fokus pada satu aspek, tapi beberapa aspek yang saling terkait. Pelaksanaan RISE di Makassar dimulai dengan penuh intensitas pada tahun 2018 dengan melakukan pengumpulan data penduduk dan rumah tangga di 12 area permukiman yang tidak formal. Dalam proses pengumpulan data awal ini, sebanyak 3.041 individu, 755 keluarga, dan 608 rumah terdata. Di samping itu, Universitas Hasanuddin bersama Monash University menandatangani sebuah perjanjian

kerjasama resmi sebagai fondasi untuk melaksanakan program tersebut di Indonesia. Pada fase awal, tim RISE melaksanakan serangkaian kegiatan seperti: pengumpulan data sosial dan lingkungan di 12 lokasi riset; pendirian Komite Keterlibatan Masyarakat (CECs) sebagai medium komunikasi bagi masyarakat; pelatihan mengenai survei kesehatan, kualitas air, tanah, dan lingkungan;Pengumpulan data dasar (survei baseline); pembangunan laboratorium RISE di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin; desain infrastruktur yang berorientasi pada alam melalui proses desain bersama masyarakat; pembangunan lokasi proyek percontohan di Kelurahan Batua (RISE, 2018).

Pembangunan infratruktur RISE ini menggunakan WSC atau Kota Peka Air yaitu Pendekatan yang melihat air tidak sekadar sebagai sumber yang perlu dialirkan dan dibuang, melainkan sebagai elemen dalam sistem ekologi kota yang perlu diatur secara komprehensif untuk mendukung kesejahteraan manusia, keberlanjutan lingkungan, dan ketahanan terhadap perubahan iklim. RISE muncul dari pengamatan bahwa sejumlah kawasan pemukiman informal mengalami masalah: Sistem sanitasi yang tidak memadai; Kontaminasi pada sumber air dan tanah; Kejadian banjir yang sering; Tingginya ancaman terhadap kesehatan akibat diare serta penyakit terkait lingkungan; Keterbatasan area hijau; Keterpaparan terhadap dampak perubahan iklim. Pendekatan tradisional yang ada sebelumnya hanya menitikberatkan pada pembangunan sistem pembuangan atau jaringan pipa tidak memadai untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan demikian, perlu adanya pendekatan yang lebih menyeluruh dengan menggabungkan aspek air, sanitasi, lingkungan, dan kesehatan masyarakat dalam satu sistem yang saling berhubungan (RISE, 2018).

Terdapat tiga pilar dari WSC ini, yaitu: kota sebagai Sumber Air Kota perlu memanfaatkan berbagai macam sumber air dengan cara yang berkelanjutan, contohnya: Air hujan; Air dari permukaan; Air tanah; Air limbah yang telah diproses ulang. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis sumber air dan memperkuat ketahanan terhadap masalah air. Kemudian, kota yang menyediakan Jasa Ekosistem Lingkungan di daerah urban yang dirancang untuk mendukung fungsi alam, seperti: Menyaring air secara alami; Mengurangi potensi banjir; Menurunkan tingkat pencemaran; Meningkatkan keanekaragaman hayati. Dalam konteks RISE, fungsi-fungsi ini dieksekusi melalui beragam teknologi yang berbasis pada alam. Selanjutnya, Masyarakat yang Peka terhadap Air dimana masyarakat terlibat aktif dalam pengelolaan air serta lingkungan dengan cara: Terlibat dalam perencanaan; Mengelola infrastruktur; Mengubah pola hidup menjadi lebih bersih dan sehat; Merawat fasilitas lingkungan. Oleh karena itu, program RISE mengadopsi pendekatan desain kolaboratif dengan

masyarakat, yang melibatkan mereka dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek (RISE, 2018). Pendekatan WSC dalam program RISE ini sebetulnya sangat membantu untuk masyarakat di wilayah kumuh dalam menghadapi persoalan-persoalan seperti sanitasi dan air bersih yang sulit mereka akses selama bermukim di wilayah tersebut, begitu pula dengan masalah perubahan iklim yang berefek pada seringnya masyarakat Kota Makassar mengalami banjir khususnya di wilayah tersebut. Program ini membantu pemerintah lokal dalam pelaksanaan program SDGs nasional yang merupakan program global khususnya pada pilar 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera, yang berupaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, pilar 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, yang terlihat dari pendekatan WSC dalam progrm ini, pilar 11 Kota dan Pemukiman Berkelanjutan yang mencoba meningkatkan kualitas pemukiman informal tanpa melakukan relokasi, pilar 13 Penanganan Perubahan Iklim dimana infrastruktur RISE mengintegrasikan konsep ketahanan iklim melalui konsep WSC tersebut, pilar 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, dimana dalam program ini melibatkan multi stakeholders dari kolaborasi mitra lokal Kota Makassar dan Internasional. Sehingga penting sebetulnya untuk menjadikan program RISE ini sebagai program nasional yang mendukung program pemerintah pusat yang telah ada.

Dinamika Peran Aktor dalam Program RISE di Kota Makassar

Awal mula Kerja sama ini pada tahun 2016 berasal dari pihak Monash University yang akan mengikuti kompetisi hibak penelitian internasional yang diselenggarakan oleh Wellcome Trust yang mencari proposal penelitian berskala besar terkati hubungan antara Kesehatan manusia dan lingkungan yang berada di Kawasan tropis dengan karakteristik permasalahan Kesehatan lingkungan dan pemukiman informal yang kuat dan Indonesia dipilih sebagai representasi Kawasan tropis Asia. Terdapat negara lain yaitu Fiji tepatnya di Suva dipilih dalam pelaksanaan program RISE ini sebagai perwakilan wilayah Pasifik. Berdasarkan wawancara dengan Dr. Ihsan Latif sebagai Tim Leader RISE Makassar sekaligus tim ahli Walikota saat itu mengatakan bahwa dalam proses penyusunan proposal tersebut pihak Monash University menghubungi Pemerintah Kota Makassar dan Universitas Hasanuddin untuk meminta dukungan kelembagaan yang menjadi salah satu syarat kompetisi dan kedua pihak menyetujuinya dan kemudian ADB pun menyetujui untuk masuk kedalam konsorsium proposal tersebut. Sehingga dimulai survey untuk melakukan pemetaan Kawasan kumuh, pengumpulan data lahan, kepemilikan tanah, jumlah keluarga, dan karakteristik pemukiman yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan proposal dan seleksi penelitian, resmi pada Agustus 2017 program mulai dilaksanakan setelah proposal berhasil memenangkan pendanaan dari Wellcome

Trust. Program RISE adalah contoh konkret kolaborasi berbagai pihak dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan. Inisiatif ini tidak terbatas pada satu lembaga atau satu negara saja, namun melibatkan kerjasama antara universitas, organisasi internasional, lembaga donor, pemerintah daerah, kelompok masyarakat sipil, sektor teknis, serta komunitas lokal. Kerumitan masalah yang ingin diatasi oleh RISE—termasuk sanitasi, kesehatan lingkungan, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan perbaikan kualitas pemukiman informal- bergantung pada keterlibatan beragam aktor dengan berbagai sumber daya, keahlian, dan wewenang.

Tahun 2019 merupakan periode yang sangat penting dalam perjalanan program RISE di Kota Makassar. Jika tahun 2018 dapat disebut sebagai fase persiapan dan pengumpulan data dasar, maka tahun 2019 merupakan fase konsolidasi, penguatan kelembagaan, penyelesaian proyek percontohan, serta persiapan implementasi skala yang lebih luas. Pada tahun ini berbagai aktor yang terlibat dalam program RISE mulai menunjukkan peran yang semakin jelas dan terintegrasi dalam mewujudkan tujuan program, yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman informal melalui pendekatan WSC. Tahun 2019 merupakan momen penting dalam kemajuan program RISE di Makassar. Meskipun tahun 2018 bisa dilihat sebagai fase awal dan pengumpulan data dasar, tahun 2019 menjadi tahap penguatan, pemantapan institusi, finalisasi proyek percontohan, dan persiapan untuk implementasi yang lebih luas. Pada tahun ini, para pemangku kepentingan dalam program RISE mulai menunjukkan fungsi yang lebih terdefinisikan dan terkoordinasi guna mencapai sasaran program, yaitu peningkatan taraf hidup penduduk dan mutu lingkungan di permukiman informal melalui metodologi WSC (RISE, 2018).

Namun pada tahun 2020 terjadi penyebaran Virus Covid-19 yang melanda seluruh dunia, sehingga semua manusia di dunia terbatas dalam beraktivitas keseharian untuk menghindari penyebarannya. Sehingga selama tahun tersebut terjadi adaptasi terhadap pandemi tanpa meninggalkan tujuan utamanya dan tetap konsisten terhadap hal yang terlah ditetapkan sebelumnya yaitu meningkatkan Kesehatan manusia, lingkungan dan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan system air dan sanitasi di pemukiman formal. Meskipun demikian tim RISE tetap menjalan beberapa kegiatan seperti pemeliharaan lokasi percontohan di Batua, kegiatan laboratorium yang terbatas, pemantau lingkungan, survey melalui telepon, persiapan teknis Pembangunan infrastruktur dan penguatan hubungan dengan Masyarakat dan pemerintah. Dapat disimpulkan tahun ini adalah masa adaptasi terhadap situasi global tanpa adanya Pembangunan fisik seperti yang telah direncanakan. Sebagai program riset internasional yang melibatkan banyak peneliti tidak hanya dari Australia dan Indonesia tapi juga Inggris dan Amerika Serikat

sehingga selama tahun ini peneliti-peneliti tersebut tidak bisa datang ke Makassar, beberapa pelatihan juga tidak bisa dilakukan serta supervise lapangan harus dihentikan. Pembangunan infrastruktur yang seharusnya sudah dilakukan sesuai rencana tidak bisa segera dilakukan. Strategi yang dilakukan lebih pada memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada tim lokak untuk tetap melakukan penelitian, pengumpulan data, analisis laboratorium, hubungan dengan Masyarakat dan pengelolaan program di lapangan (RISE, 2020). Jadi selama tahun ini strategi berubah karena efek dari penyebaran Virus Covid 19 dengan memberikan ruang yang luas kepada tim lokal dalam hal ini Unhas dan Pemerintah Kota Makassar dalam melaksanakan program RISE tersebut dan hal ini menguntungkan bagi keduanya karena mampu mengontrol program tersebut bukan oleh pihak asing yang biasanya sebagai pemilik dana menjadi pelaku penentu program. Untuk tahun 2021-2024 adalah masa dimulainya konstruksi infrastruktur RISE yang berada di lokasi percontohan di Batua dan kemudian dilanjutkan di 5 lokasi lainnya sebagaimana telah disebutkan di atas.

Sehingga analisi peran masing-masing pelaku bisa dianalisis sebagai berikut: Aktor kunci dalam program RISE adalah Universitas Monash, yang berfungsi sebagai penggagas dan pemimpin program keseluruhan. Melalui *Monash Sustainable Development Institute* (MSDI), Monash mengembangkan konsep dasar program, merancang metodologi penelitian, menciptakan kerangka Kota Sensitif Air, serta mengatur seluruh mitra yang terlibat. Sebagai lembaga akademik internasional, Monash tidak hanya berperan sebagai pusat penelitian, tetapi juga sebagai jembatan antara ilmu, kebijakan publik, dan praktik pembangunan di lapangan. Peran Universitas Monash sangat krusial karena menjamin bahwa semua kegiatan program didasarkan pada bukti ilmiah dan menciptakan pengetahuan yang dapat diterapkan di berbagai negara yang sedang berkembang. Berdasarkan Teori Peran Aktor, Monash University adalah aktor kunci dalam membangun kolaborasi lintas negara. Kampus ini berhasil mengkoneksikan antara Lembaga donor global, organisasi internasional, pemerintah lokal, universitas dan Masyarakat dalam suatu proyek kerja sama dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan manusia dan lingkungannya.

Adapun ADB memiliki pengaruh yang tidak sedikit karena terlibat dalam Pembangunan infrastruktur dan implementasi proyek ini dengan memberikan pembiayaan proyek demonstrasi, pengembangan infrastruktur sanitasi (desain) serta pengelolaan air di lokasi percontohan Batua. Perannya bisa disebut dengan *developmental facilitator* karena menyediakan sumber daya finansial, bantuan teknis, dan dukungan kebijakan untuk memastikan inovasi yang dikembangkan oleh universitas dapat diterapkan secara riil di perkotaan, dan ini menunjukkan bahwa ADB sebagai organisasi internasional yang ber-

fungsi menjadi penghubung antara penelitian dan implementasi kebijakan Pembangunan.

Universitas Hasanuddin sebagai aktor lokal merupakan mitra penting dalam program ini. Dalam hal ini Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) yang bertanggung jawab sebagai *leader* dalam pelaksanaan penelitian kesehatan dan lingkungan di seluruh lokasi yang telah ditentukan di Kota Makassar, termasuk pengelolaan laboratorium RISE yang dibangun untuk mendukung analisis sampel kesehatan dan lingkungan. Fakultas Teknik Unhas di sisi lain, sebagai pihak yang melakukan proses desain dan infrastruktur yang menjadi bagian dari pendekatan WSC. Peran Unhas di sini sangat strategis karena sebagai penghubung antara pengetahuan global yang dibawa oleh Monash University dengan konteks social, budaya dan lingkungan lokal di Makassar. Melalui keterlibatan Unhas dalam hal ini dosen, peneliti, mahasiswa dan laboratorium lokalnya dapat membantu memastikan bahwa seluruh kegiatan program sesuai dengan kebutuhan Masyarakat dan kondisi setempat.

Aktor terakhir adalah Pemerintah Kota Makassar yang berkedudukan sebagai fasilitator kebijakan karena keberhasilan program RISE ini sangat bergantung pada dukungan pemerintah lokal sebagai pemegang otoritas wilayah yang menentukan regulasi, koordinasi antar instansi, akses ke lokasi program dan mengintegrasikan kegiatan RISE ke dalam agenda Pembangunan kota. Sebagai aktor lokal, Pemerintah Kota Makassar memastikan bahwa program ini akan menjadi kebijakan perencanaan Pembangunan daerah. Sampai akhir kepemimpinan Dhany Pomanto, program ini belum masuk dalam kebijakan perencanaan Pembangunan kota meskipun terdapat wacana untuk menerbitkan peraturan walikota namun belum terwujud. Sebenarnya ada aktor lain yang berpengaruh dalam program ini yaitu Masyarakat di lokasi Pembangunan infrastruktur RISE karena berkat respon positifnya maka program ini bisa berjalan meskipun baru di 6 lokasi, tapi karena keterbatasan pendanaan maka 6 lokasi selanjutnya masih menunggu kemampuan *funding* dari tim RISE.

Kesimpulan

Program RISE di Kota Makassar merupakan bentuk kerja sama internasional yang mempertemukan aktor akademik, organisasi internasional, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat di kawasan permukiman informal. Program ini hadir sebagai respons terhadap kompleksitas persoalan permukiman kumuh yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah daerah, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap aktor memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi. Monash University berperan sebagai inisiator program, pengembang konsep WSC, sekaligus pemimpin konsorsium penelitian internasional. ADB berfungsi sebagai fasilitator pembangunan melalui dukungan pendanaan, bantuan teknis, dan penguatan implementasi infrastruktur. Universitas Hasanuddin menjalankan peran sebagai mitra akademik lokal yang menjembatani transfer pengetahuan global ke dalam konteks sosial dan lingkungan Kota Makassar. Sementara itu, Pemerintah Kota Makassar berperan sebagai fasilitator kebijakan yang menyediakan dukungan regulasi, koordinasi kelembagaan, serta akses terhadap lokasi pelaksanaan program.

Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun masing-masing aktor memiliki kepentingan kelembagaan yang berbeda, konflik kepentingan yang muncul tidak berkembang menjadi konflik terbuka. Perbedaan kepentingan tersebut lebih banyak terkait pada prioritas program, mekanisme implementasi, dan pengelolaan sumber daya. Namun demikian, hubungan antaraktor tetap dapat dipertahankan melalui mekanisme konsensus yang dibangun melalui koordinasi intensif, pembagian peran yang jelas, komunikasi berkelanjutan, dan komitmen bersama terhadap tujuan program. Pandemi Covid-19 menjadi tantangan terbesar dalam pelaksanaan program RISE. Akan tetapi, situasi tersebut justru memperkuat kapasitas aktor lokal, terutama Universitas Hasanuddin dan Pemerintah Kota Makassar, yang memperoleh ruang lebih besar dalam mengelola program ketika mobilitas tim internasional mengalami keterbatasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan program pembangunan internasional sangat bergantung pada kemampuan penguatan kapasitas lokal.

Program RISE membuktikan bahwa kerja sama internasional berbasis kemitraan multiaktor mampu menghasilkan inovasi pembangunan perkotaan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap tantangan lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Pengalaman program RISE di Kota Makassar memberikan pelajaran penting bahwa keberhasilan pembangunan permukiman informal tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana dan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan para aktor untuk membangun kolaborasi, mengelola perbedaan kepentingan, dan menciptakan konsensus dalam mencapai tujuan bersama.

.

Pernyataan Keaslian

Kami menyatakan artikel ini adalah karya asli yang belum pernah dipublikasikan dan semua sumber referensi telah dicantumkan. Kamu juga menyatakan bahwa artikel ini tidak sedang dikirimkan ke jurnal lainnya.

Referensi

Arimah, B. C. (2011). The face of urban poverty: Explaining the prevalence of slums in developing countries. In J. Beall, B. Guha-Khasnobis, & R. Kanbur (Eds.), *Urbanization and development: Multidisciplinary perspectives* (pp. 143–164). Oxford University Press.

Atika, F. A., & Ikaputra. (2023). Permukiman kumuh ditinjau dari kontinum formal dan informal (studi kasus: permukiman kumuh lintas negara). *Media Komunikasi Geografi (MKG)*, *24*(2), 168–188. https://doi.org/10.23887/mkg.v24i2.65945

Barrett, S. (1999). A theory of full international cooperation. *Journal of Theoretical Politics*, *11*(4), 519–541. https://doi.org/10.1177/0951692899011004004

Beier, R. (2020). Ordinary neighbourhoods: Stigma and reality in Casablanca's slums. *sub\urban. Zeitschrift für kritische Stadtforschung*, *8*(3), 73–96. https://doi.org/10.36900/suburban.v8i3.592

Chirisa, I., & Muneta, Z. (2023). The global south and sustainability: Issues and constraints. In R. Brinkmann (Ed.), *The Palgrave handbook of global sustainability* (pp. 955–968). Palgrave Macmillan.

Croese, S., Cirolia, L. R., & Graham, N. (2016). Towards Habitat III: Confronting the disjuncture between global policy and local practice on Africa's "challenge of slums". *Habitat International*, *53*, 237–242. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2015.11.037

Dupont, V., Jordhus-Lier, D., Sutherland, C., & Braathen, E. (Eds.). (2015). *The politics of slums in the global south: Urban informality in Brazil, India, South Africa and Peru*. Routledge.

French, M., Burge, K., Leersnyder, A., Prescott, M. F., Ramirez-Lovering, D., & Wong, T. (2021). *Water-sensitive informal settlement upgrading: Overall principles and approach*. Asian Development Bank.

Gandikota, A. V. (2024). From slums to communities: Mapping a new identity through participatory approaches. In O. K. Petőcz & N. Segal (Eds.), *Dwelling: Cultural representations of inhabited places*. Palgrave Macmillan.

Hindess, B. (1984). Interests in political analysis. *The Sociological Review*, *32*(S1), 112–131. https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.1984.tb00109.x

Kishan, A. B., Ali, M. A., & Kamraju, M. (2022). Sustainable urban development strategies for slum upgrading and environmental improvement using material science technology. *ASEAN Journal for Science and Engineering in Materials*, *1*(2), 107–116.

Mappe, U. U., Hafid, U. Q., & Amandaria, R. (2024). Permukiman kumuh di Kota Makassar: Sebuah tinjauan sosiologis. *Jurnal Predestination*, *6*(2), 47–60.

Milbert, I. (2006). Slums, slum dwellers and multilevel governance. *European Journal of Development Research*, *18*(2), 299–318. https://doi.org/10.1080/09578810600717222

Nkrumah Agyabeng, A., & Preko, A. (2021). A stakeholder analysis of government policy intervention in the Ghanaian slum communities. *Housing, Care and Support*, *24*(2), 41–53. https://doi.org/10.1108/HCS-12-2020-0020

Novanta, M. I., & Soewondo, P. (2024). Visual improvement of slums: Integrative strategy for optimizing sanitation management sustainability in slum areas. *Journal of Regional and City Planning*, *35*(2), 221–243. https://doi.org/10.5614/jpwk.2024.35.2.6

Perkim.id. (2025). 1 kota 2 dunia: Permukiman kumuh di perkotaan. *Perkim.Id*. https://perkim.id/kumuh/1-kota-2-dunia-permukiman-kumuh-di-perkotaan/

Qomaruddin, & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, *1*(2), 77–84. https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93

RISE. (2018). *RISE annual activity report 2018*. Monash University.

RISE. (2020). *RISE annual activity report 2020*. Monash University.

Roberts, R. E., & Okanya, O. (2022). Measuring the socio-economic impact of forced evictions and illegal demolition: A comparative study between displaced and existing informal settlements. *Social Science Journal*, *59*(1), 119–138. https://doi.org/10.1016/j.soscij.2018.12.003

Suhartini, N., & Jones, P. (2023). Informality and responding to the challenges of informal settlements. In N. Suhartini & P. Jones, *Beyond the informal* (Chapter 2). Springer.

Zou, X., Xu, S., & Sun, M. (2025). Sustainable social housing challenges in Global South: The role of BRICS+ in promoting sustainable social housing policy. In S. Beukes, M. Asaadi, P. Mashau, M. G. Shilina, & N. Shaik-Peremanov (Eds.), *Sustainable social housing development in BRICS+ countries*. Palgrave Macmillan.